

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh ini upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pulau pulau terluar di Indonesia adalah sejak tahun 2005 pemerintah telah melakukan kegiatan toponim yaitu upaya penamaan pulau-pulau kecil. Hal itu merupakan amanat dari Perpres No. 112 tahun 2006 tentang tim nasional pembakuan rupa bumi. Saat ini ada 13.466 pulau yang telah dilakukan dan dinamakan (semua pulau harus mempunyai letak geografis). Telah di depositkan pula di PBB pada tahun 2012 kemudian sisa pulau yang lainnya akan dilaporkan pada tahun 2017.

Disamping itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memfokuskan pembangunan di 12 pulau kecil terluar. Kedua belas pulau itu meliputi Nusa Kambangan, Pulau Sebatik, Miangas, Marore, Marampit, Lingayan, Maratua, Wetar, Alor, Enggano, Simuk dan pulau Dubi Kecil. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar merupakan upaya untuk mendukung percepatan dan pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia, memberi peluang untuk ekonomi pariwisata serta membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.

B. SARAN

1. Menambah jumlah tentara dan polisi perairan di sekitar perbatasan karena jumlah armada tentara dan polisi perairan sangat kurang mengingat luas lautan di Indonesia yang sangat luas.
2. Pemerintah harus memperbaiki sarana dan infrastruktur yang mendukung seperti dibangunnya pos pengamanan, tanda batas, komunikasi dan fasilitas umum lainnya.
3. Mengambil tindakan-tindakan nyata untuk menegaskan kedaulatan, hukum dan pemerintahan Indonesia atas pulau pulau tersebut, misalnya dengan sering melakukan patroli di sekitar pulau tersebut, terutama yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan kedaulatan, membangun tanda-tanda kedaulatan seperti mercu suar, marker titik-titik dasar (jika ada), dan lain-lain.
4. Memang perlu sekali dan sudah waktunya Indonesia mempunyai identifikasi dari pulau-pulau yang berada dalam wilayah kedaulatannya, demikian pula provinsi-provinsi dan kabupaten perlu mempunyai identifikasi yang jelas tentang pulau-pulau yang berada dalam daerahnya. Data base ini sangat penting untuk pembangunan dan pengukuhan kedaulatan negara. Hal ini dapat dicapai dengan pemahaman yang jelas dari garis pangkal Nusantara Indonesia yang sebagaimana ditetapkan dalam UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP No.38

tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

5. Penuntasan perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga baik Laut Wilayah, Zona Tambahan, Landas Kontinen maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus segera dilakukan.
6. PP No 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, kiranya perlu segera direvisi menyusul keputusan tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Kent Sondakh, 2000. *Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI*
- Djawahir Facrurozy 2000 (dkk), *Kajian Akademik Masalah Batas daratan Indonesia-Timor Lorosae* Jakarta Grasindo
- Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta : CSIS.
- Hasjim Djalal, MA. *Menjadikan Pulau Kecil Terluar Sebagai Pusat Pertumbuhan*, Sinar Grafika Jakarta
- Jefri Fernando Situmeang, 2009 *Upaya Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Kekayaan Alam Laut di Kepulauan Riau dan Pulau pulau Sekitarnya Dari Dampak Reklamasi Wilayah Singapura Universitas Atmajaya Yogyakarta*
- J.G. Starke 2008, *Pengantar Hukum Internasional* Jakarta : Sinar Grafika
- Kaligis O.C., & Associates, 2003. *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates.
- Mega Pasulian, 1999 *Penerapan Penguasaan Efektif Yang Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Blok Ambalat Dikaitkan Dengan Konvensi Hukum Laut 1982* Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja-Etty R. Agoes 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja 2003, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta Bandung
- Nugroho Notosusanto, 1970. *Norma-norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta : Dephankam.
- Sahala Hutabarat 2009, *Pengantar Ilmu Kelautan* Jakarta: Dewan Kelauran Indonesia
- Stanislaus Lintang Pramudya, 2009 *Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Berkaitan Dengan Blok Ambalat Menurut Ketentuan UNCLOS 1982* Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Sugeng Istanto 1994, *Hukum Internasional* Universitas Atmajaya Yogyakarta

Suryo Sakti Hadiwijoyo 1996, *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan*, Erlangga Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

UNCLOS 1982 (United Nations Convension of Law On the Sea)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Perundang-undangan No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna

Peraturan Perundang-undangan No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah RI no 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, belum di sosialisasikan kepada masyarakat internasional, sehingga memerlukan revisi pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

Peraturan Presiden no 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Website

<http://ugm.ac.id/id/berita/1386-rawan.konflik.12.pulau.terluar.nkri.perlu.perhatian.khusus>

<http://www.dephan.go.id/index.php>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/17/31-pulau-terluar-jadi-perhatian-pemerintah>

<http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774>

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terluar_Indonesia

<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/pemetaan-pulau-pulau-kecil-terluar>

<http://pustaka.pu.go.id/new/resensi-buku-detail.asp?id=233>

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2013. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia. Buku Ketiga* (<http://www.dkp.go.id>,

Kuswandari, E. 2006. *Peta Laut Indonesia Perlu Diperbaharui*. Sinar Harapan. (<http://www.sinarharapan.go.id>).

Sumber-sumber lain

Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013

Artikel dari surat kabar

Internatonal Herald Tribune, tanggal 28 April 2000

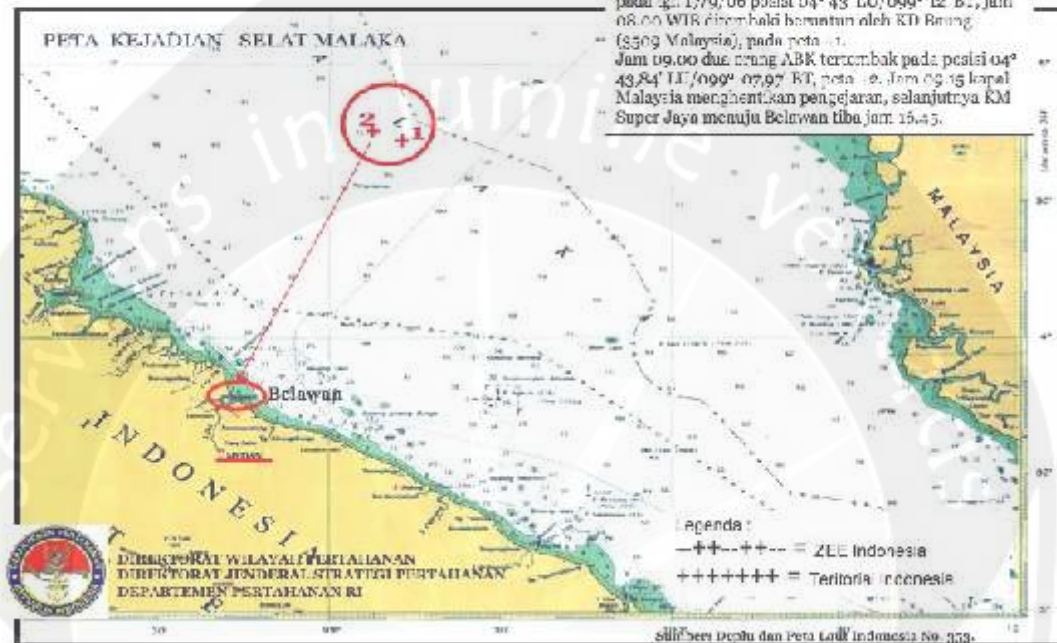
Kompas.com tanggal 12 Maret 2013

3. Pelanggaran Wilayah.

Akibat belum adanya Delimitasi Batas Maritim Antar Negara.

CONTINUE: September 2006.

KM Super Jaya (Indonesia, CT 85 No. 736/Ppa, Jenis KRI/Pakot Lempar, Nakhoda Alfian, ABK 99 orang) pada tgl. 17/9/06 posisi 04° 43' LU/099° 12' BT, jam 08.00 WIR ditembakkan baratan oleh KD Reng (3509 Malaysia), pada peta 1.
Jam 09.00 dua orang ABK tertembak pada posisi 04° 43,84' LU/099° 07,97' BT, peta 1.e. Jam 09.15 kapal Malaysia menghentikan pengejaran, selanjutnya KM Super Jaya menuju Belawan tiba jam 15.45.



Gambar 3. Wilayah pelanggaran wilayah akibat blm terselesaikannya batas landas kontinen antara Indonesia-Malaysia di Selat Malaka (Sumber : Janhidros, 2007)